



Perjanjian Kinerja 2026

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

Nomor : 1/KPN.W6-U5/RA1.10/I/2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan Akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendra Halomoan, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 5 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau



Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum.
NIP 196108101985121001



Hendra Halomoan, S.H., M.H.
NIP 197808082001121001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	99%
		b) Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	99%
		c) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	99%
		d) Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	99%
		e) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	99%
		f) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	94%
		g) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	9%
		h) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	20%
		i) Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	99%
		j) Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan E-Court.	99%
		k) Persentase perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu).	99%
		l) Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)	99%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a) Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.8
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	a) Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		b) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95
		c) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	95
		d) Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (01)	99
		e) Nilai kinerja perencanaan anggaran DIPA (03)	96
		f) Nilai Indikator Pengelolaan aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.8

Kegiatan

- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
- Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

Rp35.000.000,-
Rp8.931.740.000,-
Rp425.640.000,-

Ketua Pengadilan Tinggi Palembang



Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum.
NIP. 196108101985121001

Lubuklinggau, 5 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau



Hendra Halomoan, S.H., M.H.
NIP. 197808082011121001